BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertambahan penduduk perkotaan yang semakin pesat bukan hanya disebabkan oleh faktor internal suatu kota itu saja melainkan juga dari beberapa faktor eksternal. Kota sebagai pusat kegiatan tentu memiliki daya tarik yang tidak dimiliki oleh kawasan lain seperti kawasan pedesaan. Lengkapnya fasilitas juga sarana dan prasarana, serta tawaran akan kesempatan kerja yang lebih banyak jenisnya membuat suatu kota menjadi daya tarik dalam melakukan urbanisasi. Menurut Evers & Korff (2002) dalam Pitoyo (2007) pengertian urbanisasi yang secara umum diidentikan dengan perpindahan dari desa ke kota tidak sepenuhnya salah, namun dalam arti makna sesungguhnya urbanisasi tidak sebatas pada perpindahan penduduk dari desa ke kota namun lebih kepada proses pengkotaan. Herijanto (2000) dalam Pitoyo (2007) menyebutkan bahwa ada kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat urbanisasi suatu kota, maka akan semakin tinggi tingkat perekonomiannya.

Fenomena menonjol dari urbanisasi secara keseluruhan adalah maraknya aktivitas ekonomi baik formal maupun informal. Terutama sektor informal, perkotaan adalah ladang luas bagi tumbuhnya sektor ini (Pitoyo, 2007). Melihat fenomena pertumbuhan sektor informal di perkotaan, setidaknya ada dua kemungkinan penyebab terjadinya peningkatan jumlah pekerja di sektor informal, yaitu pertama, sektor informal mampu mengatasi masalah terbatasnya peluang kerja perkotaan akibat dominasi sektor modern. Kedua derasnya arus mobilitas penduduk berasal dari desa dan kota-kota pinggiran sekitar (Pitoyo, 2007).

Keberadaan sektor informal di Indonesia saat ini terkadang dinilai mengganggu ketertiban kota karena kerap ada di lokasi-lokasi yang tidak seharusnya seperti di tepi jalan, dan di trotoar. Namun peran sektor informal dalam perekonomian di Indonesia tidak dapat dipungkiri besar adanya, hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang tidak bisa bersaing dalam mendapat

pekerjaan di sektor formal sehingga beralih ke sektor informal. Berdasarkan Kumpulan Ringkasan Kajian dan Evaluasi Sektoral 2008 – 2013 yang diterbitkan Bappenas, kondisi pasar kerja di Indonesia menunjukkan sebagaian besar dari angkatan kerja bekerja pada lapangan kerja informal dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Berdasarkan hasil laporan yang sama, kesempatan kerja di sektor informal kota merupakan daya tarik yang kuat bagi seseorang untuk bermigrasi ke kota.

Mayoritas penduduk desa yang melakukan migrasi ke kota bertujuan untuk mencari pekerjaan di sektor informal, bukan pada sektor formal. Terbukti juga bahwa tingkat upah sektor informal di desa merupakan pendorong terjadinya migrasi ke kota. Sektor informal menurut KBBI merupakan lingkungan tidak resmi; atau lapangan pekerjaan yang diusahakan sendiri oleh pencari pekerjaan. Sektor informal identik dengan ketidakteraturan, tidak terorganisir *(unorganized),* tidak terdaftar, dan lain-lain. Di banyak negara berkembang, ekonomi informal mewakili setidaknya 2/3 dari total (formal & informal) pekerjaan non-pertanian. Di Asia Selatan dan Tenggara proporsi pekerja di sektor informal melebihi pekerja di sektor formal. Namun angka tertinggi pekerja informal diluar sektor informal berada di India dan Vietnam (ILO, 2013).

Salah satu sektor informal yang paling banyak di Indonesia dan perkembangannya sangat pesat adalah PKL (Pedagang Kaki Lima). PKL atau juga disebut *street vendor* menurut WIEGO dalam WIEGO Statistical Brief (2012 diperbaharui tahun 2015) *"... street vendor refers to those who sell goods and services in public spaces other than a store, while market traders are those who sell goods or provide services in built markets on publicly or privately owned land"*. Menurut Herlianto (2012) dalam Sitinjak (2018) sektor informal dalam hal ini PKL, merupakan sebuah sektor yang tidak diharapkan, padahal kenyataannya sektor ini adalah sektor yang lahir dari pertumbuhan ekonomi kota dan produk urbanisasi yang terjadi di negara yang sedang berkembang.

Fenomena keberadaan PKL terutama di kota besar bukan merupakan hal baru. Menurut Widjajanti (2015) kawasan perkotaan memiliki kondisi dualistik. Sujarto (1981) dalam Widjajanti (2015) menyatakan istilah dualistik memiliki

konotasi pada terjadinya pertemuan dua kondisi atau sifat yang berbeda. Kondisi tersebut pada kawasan perkotaan kemudian ditunjukkann oleh berbagai hal salah satunya terlihat dari adanya sektor formal dan informal. Adanya urbanisasi dan minimnya kemampuan SDM untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal di perkotaan menyebabkan sektor informal terutama PKL tumbuh pesat dan terus bertambah. Keberadaannya yang belum diatur menyebabkan belum tertatanya keberadaan PKL dalam ruang kota. PKL sering kali ditemukan pada ruang-ruang terbuka publik di kawasan perkotaan. Menurut Carmona et.al (2004) dalam Imansari & Khadiyanta (2015) ruang publik merupakan suatu sistem kompleks berkaitan dengan segala bagian bangunan dan lingkungan alam yang dapat diakses dengan gratis oleh publik yang meliputi jalan, *square*, lapangan, ruang terbuka hijau, atau ruang privat yang memiliki keterbukaan aksesibilitas untuk publik. PKL dan ruang terbuka publik merupakan elemen yang sulit dipisahkan, Puspitasari (2009) dalam paper yang ditulis oleh Eko Handoyo untuk Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank berjudul Makna Ruang Publik Bagi Pedagang Kaki Lima, Studi tentang Resistensi terhadap Penggusuran Tahun 2015 mengatakan bahwa PKL tidak mungkin dihilangkan dari kegiatan di ruang publik, terutama di kawasan perdagangan. PKL cenderung melakukan kegiatan berdagang di ruang terbuka publik dengan alasan dekat dengan keramaian dan menambah pendapatan/ keuntungan.

Penataan ruang dan aktivitas PKL diperlukan agar keberadaan PKL tidak lagi menjadi masalah kawasan perkotaan. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang juga melakukan upaya dalam penataan ruang dan pengaturan aktivitas untuk PKL. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu dengan merelokasi PKL. Relokasi menurut KBBI yaitu berarti pemindahan tempat. Upaya relokasi/penertiban kerap kali dilakukan oleh pemerintah dengan alasan PKL mengganggu dan melanggar aturan tata kota. Namun program relokasi atau penataan PKL yang dilakukan di Indonesia saat ini masih banyak mengalami kegagalan. Hal tersebut dikarenakan pemerintah belum melakukan pendekatan yang tepat terhadap penataan dan pengembangan PKL.

Keberadaan sektor informal PKL yang tidak direncanakan dan diatur dengan baik akan terus membuat keberadaan PKL dianggap mengganggu dan menimbulkan konflik. Pemerintah perlu memberikan kebijakan terkait hal tersebut karena semakin banyak PKL yang tumbuh terutama di kawasan perkotaan maka diperlukan perencanaan dan penataan agar PKL tidak lagi menjadi masalah namun menjadi suatu potensi di berbagai daerah yang ada. Adanya kebijakan dan peraturan serta penataan ruang dan pengaturan aktitivitas bagi PKL akan memberikan kesempatan bagi para PKL untuk mendapatkan wadah dan kesempatan untuk mengembangkan usahanya.

Bandar Lampung sebagai wilayah perkotaan sekaligus ibu kota Provinsi Lampung tidak terlepas dari masalah terkait dualistik perkotaan yaitu keberadaan sektor informal, salah satunya adalah sektor informal PKL. Keberadaannya juga belum ditata dan mengganggu manfaat ruang lain seperti badan jalan dan jalur pedestrian. Salah satunya di kawasan pusat perkotaan Bandar Lampung, disekitar RTH Taman Gajah dan sarana olahraga Lapangan Saburai, koridor Jalan Ahmad Yani – Jalan R. A Kartini dan koridor Jalan Raden Intan. Kawasan tersebut dalam RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2011 – 2030 merupakan bagian dari BWK A yang termasuk didalamnya dua kecamatan yaitu Kecamatan Enggal dan Tanjung Karang Pusat. BWK A dalam RTRW memiliki peran utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala regional. Kawasan pusat kota Bandar Lampung ini didominasi oleh aktivitas perdagangan. Adanya aktivitas ini memberi dampak pada aktivitas disekitarnya. Menurut Widjajanti (2015) dalam penelitiannya terkait Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pecinan Semarang yang juga merupakan kawasan dengan aktivitas perdaangan, kemungkinan terjadinya dualistik aktivitas kota pada kawasan ini sangat tinggi dan paling signifikan adalah sektor informal. Perkembangan PKL pada kawasan perkotaan seperti ini akan meningkat pesat dan berlokasi di dekat pusat-pusat aktivitas penduduk.

PKL di kawasan pusat perkotaan Bandar Lampung belum memiliki penataan ruang dan pengaturan aktivitas khusus sehingga masih menempati ruang-ruang publik yang tidak diperuntukkan untuk PKL. Penataan sektor

informal sebenarnya telah diatur dalam Perda Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 – 2030 pasal 59 mengenai rencana Kawasan Kegiatan Sektor Informal, dimana dalam pasal 59 ayat 1 disebutkan bahwa pengembangan kegiatan sektor informal bertujuan memberikan ruang yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima berupa pelataran dan ruang-ruang di pinggir jalan, di pusat-pusat perdagangan atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima. Dalam pasal yang sama juga disebutkan arahan terkait pengelolaan penataan ruang kegiatan sektor informal diantaranya arahan desain untuk PKL sebaiknya bersifat ekonomis, praktis, *movable,* estetis, dan fungsional serta adanya perencanaan lokasi dan waktu berdagang.

RPJMD Kota Bandar Lampung juga menjelaskan sudah adanya program penataan sektor informal PKL. Hal tersebut dijelaskan dalam program utama dari bidang Perdagangan dan Jasa yaitu program Penataan Sektor Informal dengan lokasi pelaksanaan program ini meliputi kawasan Bambu Kuning, Pasar Bawah dan Pasar Tengah. Program terkait pedagang kaki lima juga disebutkan dalam program utama dari bidang Prasarana Sarana Pejalan Kaki dan Evakuasi Bencana yaitu Penataan Pedestrian dan Pedagang Kaki Lima, dimana lokasi pelaksanaan program ini meliputi kawasan pusat perdagangan jasa primer dan sekunder, kawasan pendidikan, dan kawasan perkantoran pemerintah Teluk Betung. Pengelolaan PKL di Kota Bandar Lampung kemudian diatur melalui Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan PKL, namun pengelolaan tersebut belum mencakup arahan penataan PKL di ruang terbuka publik serta penetapan ruang/ lokasi penataan PKL.

Rencana penataan ruang dalam RTRW serta program penataan PKL di RPJMD Kota Bandar Lampung belum dilaksanakan sepenuhnya sehingga sampai saat ini, Bandar Lampung belum mempunyai arahan zonasi khusus terkait penataan ruang dan aktivitas PKL terutama di kawasan ruang terbuka publik di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan sebagai langkah tindak lanjut dalam penyusunan arahan penataan ruang dan zonasi ktivitas PKL di ruang terbuka publik di kawasan pusat perkotaan Bandar Lampung. Hasil

penelitian ini berupa arahan penataan ruang dan pengaturan zonasi aktivitas PKL diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam melakukan penataan sektor informal PKL yang ada di ruang terbuka publik kawasan perkotaan Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah telah mengamanatkan penataan PKL melalui Permendagri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penataan PKL dalam pedoman tersebut diartikan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui RTRW dan RPJMD telah menempatkan penataan PKL pada rencana pembangunan Kota Bandar Lampung. Pasal 59 ayat 1 Perda Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2030 menyebutkan bahwa perencanaan pengembangan kegiatan informal bertujuan untuk memberikan ruang yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima berupa pelataran dan ruang-ruang pinggir jalan, di pusat-pusat perdagangan atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima. Penataan PKL juga diwujudkan dalam bentuk rencana program penataan sektor informal dan PKL yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021.

Pengelolaan PKL yang tercantum dalam Perda Kota Bandar Lampung No. 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan PKL ternyata belum diterapkan di kawasan pusat perkotaan Bandar Lampung. Kawasan pusat perkotaan dalam penelitian ini meliputi kawasan RTH Taman Gajah dan Lapangan Saburai, koridor Jalan Jenderal Ahmad Yani – Jalan R. A Kartini dan koridor Jalan Raden Intan. Menurut Permendagri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun rencana penyediaan lokasi binaan/ ruang khusus untuk kegiatan

PKL. Adanya lokasi binaan akan membentuk penataan PKL yang lebih tertib dan rapi sehingga tidak mengganggu estetika dan kerapihan kota. Penetapan lokasi binaan PKL ini dapat bersifat permanen dan sementara dimana lokasi permanen diarahkan menjadi kawasan/ pusat promosi produk unggulan daerah sedangkan lokasi sementara merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan pemerinah daerah. Lokasi binaan ini juga dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.

Kota Bandar Lampung melalui Perda penataan PKL belum menetapkan lokasi binaan untuk PKL sehingga PKL yang ada cenderung menempati ruang-ruang terbuka publik yang kosong dan memiliki aksesibilitas serta akumulasi kegiatan masyarakat yang tinggi seperti disekitar taman dan sepanjang jalan utama. Soetomo (1996) dalam Widjajanti (2009) menyebutkan bahwa PKL biasanya menempati ruang-ruang publik (trotoar, taman, pinggir badan jalan, kawasan tepi sungai, di atas saluran drainase) yang mengakibatkan ruang publik tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh penggunanya dengan baik sesuai fungsinya. PKL pada kawasan pusat perkotaan Bandar Lampung juga memiliki karakteristik permasalahan ruang yang sama yaitu menempati ruang-ruang terbuka publik yang tidak diperuntukkan sebagai lokasi kegiatan PKL.

Kegiatan PKL pada ruang yang tidak sesuai dengan peruntukkannya ini menimbulkan konflik penggunaan ruang. Belum tersedianya ruang khusus untuk penataan PKL dan pengaturann waktu operasional untuk menunjang ketertiban kegiatan berdagang PKL mengakibatkan lokasi/ ruang yang menjadi tempat kegiatan PKL cenderung terkesan tidak tertata dan mengganggu. Sarana berdagang yang tidak diatur kembali saat selesai berdagang, luas lapak yang hanya mementingkan kebutuhan pedagang serta tidak tersedianya fasilitas serta sarana dan prasarana menambah tidak tertatanya ruang/ lokasi yang digunakan PKL berdagang.

Sumber: Dokumen Pribadi Penulis, 2019.

GAMBAR 1.1
KEBERADAAN PKL DI SEKITAR RTH TAMAN GAJAH DAN LAPANGAN SABURAI

Penataan ruang dan aktivitas PKL juga telah dilakukan di beberapa kawasan perkotaan di Indonesia. Penerapan penataan PKL di ruang terbuka publik diantaranya dilakukan dengan mengakomodasi kegiatan PKL di ruang terbuka publik seperti trotoar dan lahan parkir pertokoan. Bukan hanya dengan merelokasi PKL, namun memberi ruang serta fasilitas dan sarana prasarana dapat menjadi alternatif penataan PKL di ruang terbuka publik. Selain mengakomodasi ruang untuk PKL di ruang terbuka publik, penyeragaman sarana berdagang juga menjadi salah satu cara penataan PKL agar lebih rapih dan efektif. Penerapan penyeragaman sarana berdagang PKL dilakukan pada beberapa penataan PKL seperti PKL Pasar Semawis menggunakan tenda dan PKL Cikapundung menggunakan tenda *knock down.* Penataan PKL bukan hanya terkait ruang namun juga aktivitas PKL, pengaturan waktu opearasional dan pembagian blok/ zona kegiatan PKL juga dapat diterapkan sebagai alternatif penyelesaian masalah penataan PKL di pusat perkotaan Bandar Lampung.

Adanya rencana arahan dalam RTRW Kota Bandar Lampung terkait kegiatan sektor informal dan program penataan PKL pada RPJMD Kota Bandar Lampung belum menyelesaikan permasalahan keberadaan PKL di ruang terbuka publik. Sehingga perlu adanya arahan lanjutan dalam penataan PKL terutama di ruang terbuka publik kawasan pusat perkotaan Bandar Lampung yang juga sesuai dengan arahan dokumen rencana Kota Bandar Lampung serta mempertimbangkan

karakteristik baik fisik maupun aktivitas PKL. Arahan ini nantinya diharapkan akan dapat memberi rekomendasi bagi pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melakukan penataan ruang serta pengaturan aktivitas bagi PKL. Dari rumusan masalah diatas maka didapatkan pertanyaan penelitian yaitu **bagaimana arahan zonasi penataan lokasi/ ruang serta pengaturan aktivitas PKL di ruang terbuka publik kawasan pusat perkotaan Bandar Lampung?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, juga rumusan masalah yang ada maka tujuan dari peneliti`an ini yaitu untuk **menemukan alternatif penyelesaian permasalahan ruang dan aktivitas PKL melalui arahan zonasi penataan ruang dan pengaturan aktivitas PKL di ruang terbuka publik pada kawasan pusat perkotaan Bandar Lampung** dengan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik fisik dan aktivitas PKL serta terintegrasi antar sektor formal dan informal.

1.4 Sasaran Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga sasaran utama untuk mencapai tujuan yang ada, yaitu:

1. Mengidentifikasi kebijakan dan peraturan penataan PKL.
2. Mengidentifikasi karakteristik fisik dan aktivitas PKL di ruang terbuka publik kawasan perkotaan Kota Bandar Lampung.
3. Mengidentifikasi preferensi stakeholder penataan PKL di ruang terbuka publik Kota Bandar Lampung.
4. Menyusun arahan zonasi penataan ruang dan pengaturan aktivitas PKL di ruang terbuka publik secara terpadu dan terintegrasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, penerapan penataan ruang dan aktivitas untuk PKL di ruang terbuka publik dengan mengakomodasi dan memberikan fasilitas serta sarana dan prasarana dapat menjadi alternatif penataan PKL di kawasan pusat perkotaan selain relokasi PKL. PKL yang cenderung menempati ruang terbuka publik dengan kemudahan aksesibilitas dapat meningkatkan dan memaksimalkan penggunaan suatu lahan/ ruang melalui pemanfaatan ruang tersebut menjadi ruang untuk kegiatan PKL. Penggunaan lahan/ ruang secara maksimal untuk sektor informal PKL dapat dilakukan dengan memperhatikan waktu operasional/ aktivitas kegiatan PKL. Adanya penataan ruang dan pengaturan aktivitas PKL pada kawasan pusat perkotaan Bandar Lampung ini dapat menyelesaikan permasalahan ruang dan aktivitas/ kegiatan PKL di kawasan pusat perkotaan yang masih menimbulkan permasalahan dan konflik penggunaan ruang.
2. Secara praktis, arahan yang akan direncanakan untuk penataan ruang dan pengaturan aktivitas sektor informal PKL dalam penelitian ini dapat menjadi rekomendasi pemerintah dalam penataan ruang untuk kegiatan sektor informal PKL di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini juga dapat menjadi kajian pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengetahui arahan penataan yang sesuai dengan karakteristik fisik dan aktivitas sektor informal PKL di ruang terbuka publik kawasan pusat kota Bandar Lampung, dan menjadi rekomendasi untuk dimasukkan kedalam dokumen rencana penataan ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung, penyusunan program penataan PKL pada RPJMD Kota Bandar Lampung serta peraturan/ kebijakan khusus terkait penataan PKL yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup wilayah, ruang lingkup substansi dan ruang lingkup waktu.

1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah

Cakupan wilayah dalam penelitian ini yaitu kawasan pusat perkotaan di Bandar Lampung yaitu kawasan disekitar RTH Taman Gajah dan sarana olahraga Lapangan Saburai, koridor Jalan Ahmad Yani – Jalan R. A Kartini dan koridor Jalan Raden Intan, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan tata guna lahan yang ada, koridor jalan tersebut merupakan kawasan ruang terbuka publik, dan kawasan padat perdagangan dan jasa. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat perkotaan Bandar Lampung yang menjadi pusat kegiatan Kota Bandar Lampung. Letaknya yang berada di pusat perkotaan dan pusat kegiatan menyebabkan sektor informal PKL tumbuh dan menempati ruang terbuka publik yang tersedia. Lokasi penelitian berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan Kecamatan Enggal, kawasan penelitian dibagi menjadi 3 segmen berdasarkan guna lahan. Pembagian ketiga segmen sesuai guna lahan ini dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing kegiatan yang ada di lokasi penelitian dalam pengaruhnya dengan keberadaan PKL, ketiga segmen tersebut yaitu:

1. Segmen satu dengan guna lahan sebagai ruang terbuka yaitu sekitar kawasan RTH Taman Gajah dan Lapangan Saburai.
2. Segmen kedua, Jalan Jendral Ahmad Yani – Jalan R. A Kartini dengan guna lahan kawasan perdagangan dan jasa.
3. Segmen ketiga yaitu, Jalan Raden Intan yaitu dengan guna lahan perdagangan dan jasa lebih terfokus pada Jasa.

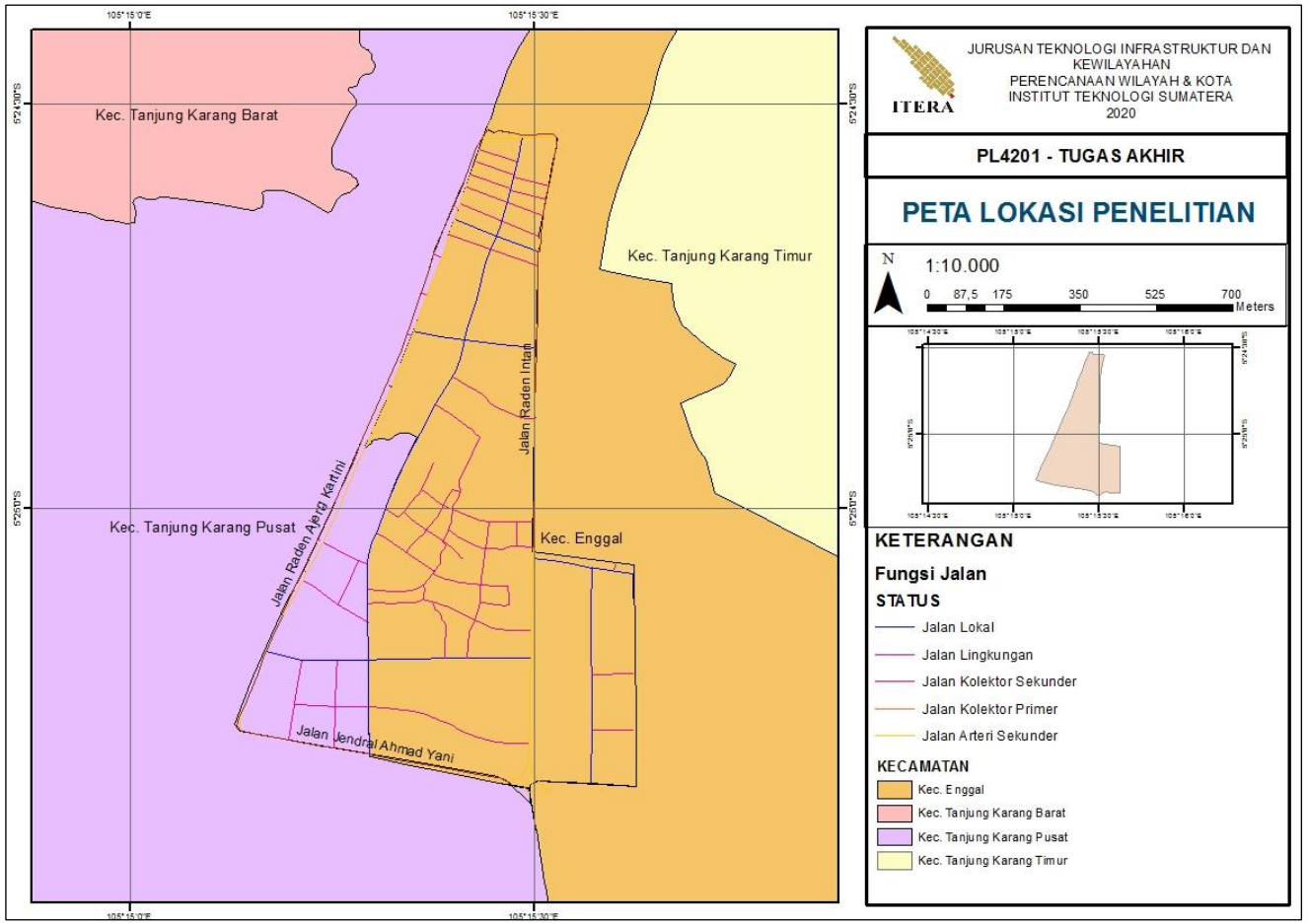

Sumber: Hasil analisis, 2019.

GAMBAR 1.2
PETA LOKASI PENELITIAN

1.6.2 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi dari penelitian ini terkait apa saja yang menjadi dasar penelitian dan cakupan substansi penelitian yang harus ada. Lingkup substansi dalam penelitian ini terkait dengan identifikasi kebijakan dan peraturan penataan PKL, karakteristik fisik dan aktivitas PKL di kawasan pusat perkotaan Bandar Lampung, serta preferensi PKL dan konsumen PKL. Setelah itu, hasil dari identifikasi tersebut akan digunakan untuk merumuskan arahan penataan ruang dan pengaturan aktivitas PKL di ruang terbuka publik kawasan pusat perkotaan Bandar Lampung yang nantinya akan dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah PKL. Lingkup PKL yang dimaksud adalah PKL yang bersifat menetap dan semi menetap yang menggunakan ruang terbuka publik di wilayah penelitian sebagai lokasi berdagang. Ruang lingkup substansi kemudian dirumuskan sebagai berikut:

1. Substansi teori keberadaan sektor informal dalam kegiatan di kawasan pusat perkotaan khususnya pedagang kaki lima.
2. Kajian tentang penyusunan arahan penataan PKL ditinjau daria aspek penyediaan dan pemanfaatan ruang, aktivitas/ waktu operasional serta zonasi penataan PKL.
3. Memaksimalkan penggunaan ruang terbuka publik untuk kegiatan berdagang PKL melalui penataan penggunaan ruang yang dilengkapi dengan waktu operasional.

1.6.3 Ruang Lingkup Waktu

Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat pertumbuhan dan perkembangan sektor informal PKL Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 5 tahun pada tahun 2015-2019.

1.7 Kerangka Pikir

Penataan PKL di ruang terbuka publik di pusat Kota Bandar Lampung yang belum dilakukan dengan baik mengganggu fungsi ruang terbuka publik dan menimbulkan konflik penggunaan ruang. Hal tersebut melatarbelakangi adanya penelitian untuk mendapatkan penyelesaian masalah ruang dan aktivitas yang

ditimbulkan dari keberadaan PKL di kawasan pusat perkotaan di Bandar Lampung pada wilayah penelitian yang telah ditetapkan sehingga PKL yang ada sekarang keberadaannya tidak lagi mengganggu aktivitas ruang lain.

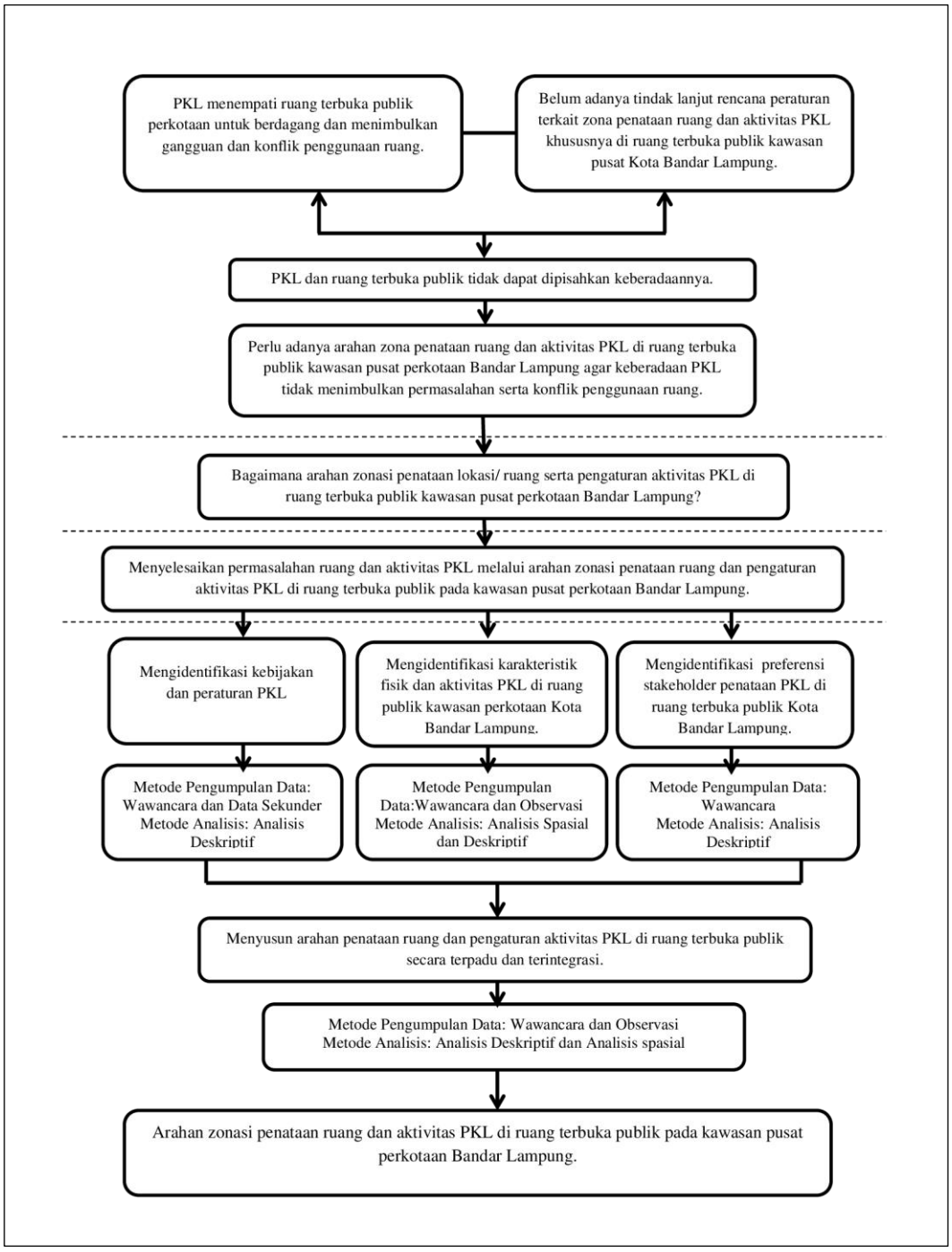

Sumber: Hasil analisis, 2020.

GAMBAR 1.3
KERANGKA PENELITIAN

1.8 Metodologi Penelitian

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan meliputi pendekatan penelitian, data serta metode pengumpulan data yang digunakan, metode analisis yang digunakan dalam mengolah data penelitian, serta tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian.

1.8.1 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian deduktif karena penelitian ini berangkat dari berbagai teori yang didapatkan dan dibandingkan dengan keadaan fakta/ kondisi eksisting. Untuk mendapatkan variabel-variabel yang dibutuhkan untuk nantinya akan diuji ke lapangan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan maka pengumpulan data penelitian ini terbagi dalam dua kelompok besar yaitu:

1.8.1.1 Metode Pengumpulan Data Primer.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan/ lokasi penelitian. Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data dan gambaran terkait lokasi persebaran PKL di kawasan pusat perkotaan Bandar Lampung yaitu kawasan disekitar RTH Taman Gajah dan sarana olahraga Lapangan Saburai, koridor Jalan Ahmad Yani – Jalan R. A Kartini dan koridor Jalan Raden Intan. Pengumpulan data primer dilakukan untuk mengetahui karakteristik fisik serta aktivitas PKL di lokasi penelitian. Pada penelitian ini, data primer yang dikumpulkan terkait karakteristik fisik dan aktivitas PKL yaitu meliputi lokasi persebaran PKL, jenis dagangan PKL, sarana berdagang PKL, luas lapak yang digunakan PKL untuk berdagang, pola penyebaran PKL, waktu operasional PKL, serta sifat pelayanan PKL. Untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan, penelitian ini melakukan pengumpulan data primer dengan dua cara, yaitu:

1) Observasi.

Menurut Nazir (1988) observasi yaitu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat

indera. Manfaat dari teknik obervasi berdasarkan data-data metodologi penelitian menurut Lexy J. Moleong (1988) dalam Nazir (1988) yaitu diantaranya:

a. Merupakan alat yang murah, mudah, dan langsung untuk mengadakan penelitian terhadap berbagai macam fenomena sosial yang terjadi.
b. Para koresponden yang sangat sibuk umumnya tidak keberatan jika diamati namun keberatan jika diminta untuk mengisi daftar pertanyaan; atau angket; atau wawancara.

Menurut Hasanah (2017), observasi dalam implementasinya tidak hanya berperan sebagai teknik paling awal dan mendasar dalam penelitian, tetapi juga teknik paling sering dipakai, seperti observasi partisipan, rancangan penelitian eksperimental, dan wawancara. Menurut (Santana, 2007) dalam Hasanah (2017) metode observasi yang digunakan pada setiap kegiatan penelitian bervariasi tergantung pada setting, kebutuhan dan tujuan penelitian. Hasanah (2017) juga menjelaskan bahwa obervasi untuk tujuan empiris mempunyai tujuan bermacam-macam. Observasi juga memiliki fungsi bervariasi. Tujuan dari observasi berupa deskripsi, melahirkan teori dan hipotesis (pada penelitian kualitatif), atau menguji teori dan hipotesis (pada penelitian kuantitatif). Menurut Rahmat (2005) dalam Hasanah (2017) fungsi observasi terdiri dari deksripsi, mengisi, dan memberikan data yang dapat digeneralisasikan.

Teknik obervasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu mengamati secara langsung PKL yang ada di lokasi penelitian. Observasi dilakukan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan gambaran umum dari karakteristik khusus PKL di lokasi penelitian. Karakteristik tersebut meliputi karakateristik fisik dan aktivitas PKL. Data hasil observasi ini kemudian juga digunakan sebagai bahan triangulasi data wawancara PKL dan konsumen PKL. Observasi dilakukan berdasarkan tiga segmen yang telah dibagi berdasarkan lokasi persebaran PKL di lokasi penelitian. Ketiga segmen tersebut meliputi segmen pertama yaitu kawasan sekitar RTH Taman Gajah dan Lapangan Saburai, segmen dua meliputi koridor Jalan Ahmad Yani dan Jalan R. A Kartini serta segmen 3 meliputi koridor Jalan Raden Intan. Selanjutnya, observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan PKL yang ada pada setiap segmen, mulai dari karakter fisik seperti jenis pedagang yang

ada di lokasi, sarana berdagang yang digunakan, luas lapak yang dibutuhkan, pola penyebaran PKL, serta *activity suppot* atau kegiatan yang ada pada setiap segemen lokasi. Sedangkan untuk pengaturan aktivitas PKL, peneliti mengamati waktu operasional dari PKL yang ada di lokasi penelitian. Observasi dilakukan dengan waktu-waktu operasional PKL yang berbeda mulai dari pagi hari, siang hari, sore hari dan malam hari. Dari waktu operasional tersebut, dapat juga diamati sifat pelayanan PKL.

2) Wawancara.

Wawancara menurut Moleong (2004) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dimana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sedangkan menurut Soegijono (1993), yang dimaksud dengan wawancara yaitu:

a. Proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek.
b. Wawancara dapat dipakai sebagai cara pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.

Moleong (2004) menjelaskan bahwa ada bermacam-macam cara pembagian jenis wawancara yang dikemukakan dalam kepustakaan. Patton (1980) dalam Moleong (2004) cara pembagian jenis wawancara yaitu meliputi (a) wawancara pembicaraan informal, (b) pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, dan (c) wawancara baku terbuka. Pada wawancara pembicaraan informal, pertanyaan yang diajukan bergantung pada pewawancara, jadi bergantung kepada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan. Jenis wawancara yang kedua yaitu pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi

wawancara. Pada wawancara baku terbuka, wawancara menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Dengan artian bahwa, keluwesasn mengadakan pertanyaan pendalaman *(probing)* terbatas.

Pembagian jenis wawancara lain juga dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (1981) dalam Moleong (2004) dimana jenis wawancara menurut mereka yaitu (a) wawancara oleh tim atau panel, (b) wawancara tertutup dan wawancara terbuka, (c) wawancara riwayat secara lisan, dan (d) wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Wawancara oleh tim/ panel berarti wawancara dilakukan tidak hanya oleh satu orang, tetapi oleh dua orang atau lebih terhadap seseorang yang diwawancarai. Selanjutnya yaitu wawancara tertutup dan terbuka, dimana pada wawancara tertutup biasanya yang diwawancarai tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa mereka diwawancarai, sedangkan wawancara terbuka para subjeknya tahu bawa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara itu. Wawancaa riwayat secara lisan merupakan jenis wawancara terhadap orang-orang yang pernah membuat sejarah atau yang membuat karya ilmiah besar, sosial, pemabngunan, perdamaian dan sebagainya. Maksud dari wawancara yaitu untuk mengungkapkan riwayat hidup, pekerjaan, dan lain-lain. Terakhir yaitu wawancara terstruktur dan tak terstruktur, wawancara terstruktur adalah wawancara dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Format wawancara yang digunakan bisa bermacam-macam dengan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang cirinya kurang diinterupsi dan arbitrer. Wawancara tak terstruktur digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.

Wawancara pada penelitian ini merupakan wawancara terstruktur yang digunakan untuk mendapatkan data primer terkait dengan karakteristik fisik dan aktivitas PKL di lokasi penelitin. Wawancara dilakukan kepada PKL yang berada di lokasi penelitian. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan berdasarkan jenis dagangan PKL yang ada di lokasi penelitian. Untuk wawancara kepada PKL dilakukan secara langsung di lokasi. Dari wawancara tersebut kemudian akan didapatkan data dan informasi terkait karakteristik fisik dan aktivitas PKL yang

ada di lokasi penelitian serta beberapa unit info tambahan. Selain melakukan wawancara dengan PKL, wawancara juga dilakukan kepada masyarakat disekitar lokasi penelitian yang dalam hal ini merupakan konsumen dari PKL. pengumpulan data wawancara konsumen PKL dilakukan secara online menggunakan google formulir dengan kriteria responden yaitu masyarakat yang pernah berbelanja atau menjadi konsumen dari PKL di lokasi penelitian selama 6 bulan terakhir. Penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan agar informasi yang didapatkan tidak terbatas dan dapat menjadi salah satu preferensi zonasi penataan ruang dan pengaturan aktivitas PKL di lokasi penelitian baik dari preferensi PKL maupun preferensi masyarakat sebagai konsumen PKL.

1.8.1.2 Metode Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi-informasi awal terkait dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan kebijakan dan peraturan dari penataan PKL. Data sekunder meliputi data kebiajakan, peraturan serta pedoman penataan PKL mulai dari pusat hingga ke daera. Untuk tingkat daerah pengumpulan data sekunder dilakukan untuk mendapatkan data yang tidak tersedia langsung di lapangan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari instansi, dokumen rencana, studi literatur, serta informasi terpercaya lainnya yang didapat dari publikasi di internet. Beberapa data sekunder yang digunakan penelitian ini antara lain:

1. Kota Bandar Lampung dalam Angka Tahun 2019
2. Data PDRB Kota Bandar Lampung Tahun 2014 – 2018.
3. RTRW Kota Bandar Lampung tahun 2011 – 2030.
4. RPJMD Kota Bandar Lampung 2016 – 2021.
5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Kepentingan Umum.
6. Jurnal dan buku terkait penelitian.

Dari data yang didapatkan maka akan digunakan untuk melengkapi data primer yang didapatkan langsung dari lapangan. Data-data tersebut juga digunakan untuk mengetahui kebijakan, peraturan, atau program dari sudut pandang pemerintah/ pemangku kebijakan terkait penataan dan pengembangan PKL di Kota Bandar Lampung. Selain data sekunder yang didapatkan dari internet, data sekunder juga didapatkan dari wawancara instansi/ stakeholder terkait penataan dan pengembangan PKL. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Bappeda Kota Bandar Lampung dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung. Selain itu data sekunder berupa jurnal, buku, dan penelitian terdahulu terkait tema dan fokus penelitian digunakan sebagai referensi dan literatur penulisan penelitian.

1.8.2 Metode Pemilihan Sampel

Dalam melakukan penelitian ini, akan sulit jika mengikutsertakan/ melibatkan keseluruhan populasi yang ada, maka dilakukanlah metode *sampling* yang nantinya akan mewakili populasi yang ada. Menurut Tailor (2005) dalam Etikan & Alkassim (2016) menyebutkan bahwa sampel adalah bagian dari populasi atau alam semesta. Sedangkan Walliman (2011) dalam Etikan & Alkassim (2016) menyebutkan bahwa sampel bukan hanya berati jumlah orang dalam suatu populasi saja, melainkan juga dapat berarti hal-hal atau kasus yang merupakan subjek penelitian. Dalam menggunakan metode pengambilan sampel, jumlah sampel yang diambil harus dapat merepresentasikan populasi yang ada. Dalam penelitian ini digunakan teknik *sampling* yaitu *non-probability sampling.*

Non probability sampling yaitu penunjukan responden dilakukan tanpa peluang, melainkan dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam *non probability sampling* pengacakan dalam memilih sampel dalam populasi tidak terlalu menjadi perhatian, melainkan pemlihan sampel dilakukan secara subyektif. Oleh karena itu, *non probability sampling* merupakan metode dimana dalam pemilihan sampel, setiap orang dalam populasi tidak memiliki kesempatan yang sama melainkan hanya yang memiliki kriteria khusus yang sesuai dengan penelitian (Etikan & Alkassim, 2016:1). Metode *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling. Purposive sampling* menurut Bernard

(2002) dalam Etikan et.al (2016) disebut juga *judgement sampling. Purposive sampling* dalam sederhananya merupakan metode dimana peneliti memutuskan apa yang perlu diketahui dan ditetapkan untuk menemukan narasumber/ responden yang dapat dan bersedia memberikan informasi berdasarkan pengetahuan/ pengalaman. Metode ini juga tidak didasarkan pada teori tertentu yang mendasari jumlah peserta/ responden yang harus didapat. Menurut Cresweel dan Clark (2011) dalam Etikan, et.al (2016) menyebutkan bahwa pemilihan sampel dilakukan kepada yang memiliki pengetahuan dan ketertarikan terhadap studi ini.

Purposive sampling memiliki beberapa metode yang digunakan dalam pengambilan sampel, dalam penelitian ini yang digunakan yaitu *maximum variation sampling* dimana dalam metode ini memungkinkan pemilihan responden dari sisi lebih luas yang berkaitan dengan studi yang ada. Dalam penelitian ini subjek yang digunakan yaitu PKL dan konsumen di lokasi penelitian. Morse dan Niehaus (2009) dalam Etikan, Musa, & Alkassim, *Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling* (2016) juga menyebutkan metode *purposive sampling* menempatkan penekanan utama pada saturasi yaitu memperoleh pemahaman yang komprehensif dengan terus mengambil sampel sampai tidak ada informasi substantif baru diperoleh. Purposive sampling menggunakan kriteria dalam pemilihan responden, pada penelitian ini, kriteria responden yang digunakan dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Kriteria untuk responden Pemerintah Kota Bandar Lampung:
    a. Memiliki wewenang terhadap penataan PKL Kota Bandar Lampung.
    b. Memiliki wewenang terhadap penataan ruang di Kota Bandar Lampung.
2. Kriteria untuk responden PKL dan konsumen PKL di kawasan pusat perkotaan Bandar Lampung.
    a. PKL bersifat menetap dan semi menetap yang melakukan kegiatan berdagang di ruang terbuka publik kawasan pusat perkotaan Bandar Lampung yang termasuk kedalam wilayah penelitian.

b. Bukan termasuk PKL yang menggunakan kendaraan seperti mobil, motor, sepeda, dll.
c. Responden merupakan konsumen/pembeli dari PKL yang berada di lokasi penelitian selama kurun waktu ±6 bulan terakhir.

1.8.3 Metode Analisis Data

Dalam melakukan penelitian biasanya terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian deduktif dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Muslimin (2016) dalam Moleong (2004), pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendeksripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deksriptif. Menurut Bodgan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2004) menyatakan bahawa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data dan perilaku yang diamati. Sedangkan Creswel (2013) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki suatu isu dengan cara mengumpulkan cerita dari berbagai individu melalui pendekatan naratif dengan wawancara secara mendalam. Beberapa ciri dari penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Berkembang dinamis.
2. Pertanyaan-pertanyaan terbuka.
3. Data wawancara, observasi, dokumentasi, dan audiovisual.
4. Analisis tekstual dan gambar.
5. Interpretasi tema-tema dan pola-pola.

1.8.3.1 Sasaran 1: Mengidentifikasi kebijakan dan peraturan dan kondisi eksisting penataan PKL di Kota Bandar Lampung

Sasaran pertama yaitu mengidentifikasi arahan dan kebijakan penataan PKL serta kondisi eksisting penataan PKL di Kota Bandar Lampung. Analisis yang digunakan pada sasaran ini adalah analisis deskriptif. Menurut Nazir (1988),

analisis deskriptif merupakan metode dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi ataupun suatu sistem pemikiran. Pada sasaran satu, analisis deksriptif dilakukan untuk menganalisis kebijakan dan peraturan serta pedoman penataan PKL mulai dari nasional hingga daerah. Kebijakan dan peraturan terkait penataan PKL diperoleh dari data sekunder dan wawancara kepada instansi terkait penataan PKL. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan kembali penataan PKL pada setiap dokumen rencana, kebijakan dan peraturan serta pedoman yang memuat penataan PKL didalamnya baik secara nasional maupun tingkat Kota Bandar Lampung. Dari hasil analisis ini kemudian didapatkan gambaran umum mengenai urgensi, kepentingan dan kedudukan penataan PKL di secara nasional dan kondisi eksistingnya di Bandar Lampung.

1.8.3.2 Sasaran 2: Mengidentifikasi karakteristik fisik dan aktivitas PKL di ruang terbuka publik kawasan perkotaan Kota Bandar Lampung

Sasaran kedua yaitu mengidentifikasi karakteristik fisik dan aktivitas PKL di ruang terbuka publik Kota Bandar Lampung. Analisis yang digunakan pada sasaran kedua yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif dalam sasaran ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik fisik dan aktivitas dari PKL di kawasan pusat kota Bandar Lampung. Karakter fisik dilihat dari ruang yang digunakan, sedangkan aktivitas PKL dilihat dari waktu operasional dan sifat pelayanan PKL. Menurut Rahmat (2005) dalam Hasanah (2017) fungsi observasi terdiri dari deksripsi, mengisi, dan memberikan data yang dapat digeneralisasikan, analisis deskriptif pada sasaran kedua dilakukan kepada data hasil observasi dan menghasilkan informasi berupa deskripsi, peta, serta gambaran umum karakteristik PKL di wilayah penelitian.

1.8.3.3 Sasaran 3: Mengidentifikasi preferensi stakeholder penataan PKL di ruang terbuka publik Kota Bandar Lampung

Sasaran ketiga yaitu mengidentifikasi preferensi stakeholder penataan PKL di ruang terbuka publik Kota Bandar Lampung. Analisis yang digunakan pada sasaran ini yaitu analisis deskriptif. Dimana pada sasaran ini, analisis desksriptif digunakan untuk membuat deskripsi atau gambaran sistematis terkait preferensi/ peran dari masing-masing stakeholder penataan PKL di ruang terbuka publik yaitu

dilihat dari preferensi PKL dan preferensi masyarakat sebagai konsumen PKL. Analisis dilakukan dengan mengolah data wawancara dengan proses mereduksi data, kemudian dilanjutkan analisis data wawancara dan interpretasi data dengan mendialogkan hasil analisis dengan teori yang digunakan. Selanjutnya akan dilakukan triangulasi sumber data yaitu antar data wawancara PKL dan data wawancara konsumen, serta antar hasil analisis data wawancara dengan observasi. Analisis ini kemudian menghasilkan gambaran umum penataan PKL yang ideal berdasarkan preferensi PKL dan konsumen PKL.

1.8.3.4 Sasaran 4: 4. Menyusun arahan penataan ruang dan pengaturan aktivitas PKL di ruang terbuka publik secara terpadu dan terintegrasi

Sasaran keempat yaitu merumuskan arahan penataan ruang dan pengaturan aktivitas PKL di ruang terbuka publik secara terpadu dan terintegrasi. Pada sasaran ini digunakan analisis deskriptif dan analisis spasial. Dimana analisis spasial, menurut Ningsih et.al (2005), yaitu berarti menambah dimensi ruang *(space)* atau geografi pada analisis. Proses Analisa Spasial meliputi kegiatan membuat buffer disekitar titik *(point)*, garis *(line)* dan area *(polygon)*, menganalisis peta dengan titik, garis dan area dengan proses *overlay* mengunakan metode intersection, union, identitas, hapus, dan klip. Analisis pada sasaran ini dilakukan dengan menggabungkan dan mendialogkan hasil analisis dari ketiga sasaran utama menggunakan analisis deskriptif dan spasial. Penggunaan analisis deskriptif yaitu untuk menyusun arahan penataan ruang dan aktivitas, sedangkan analisis spasial digunakan untuk memberikan gambaran lebih jelas terkait penataan ruang dan aktivitas untuk PKL melalui zona penataan PKL. Penyusunan arahan penataan dilakukan dengan menggabungkan hasil tiga analisis utama yang didialogkan dengan teori/ literatur serta preseden penataan PKL. Penataan ruang tersebut kemudian akan dilengkapi dengan waktu operasional penataan PKL yang didapatkan dari analisis karakteristik aktivitas PKL untuk memaksimalkan penggunaan ruang. Setelahnya maka akan dibentuk zona berupa zona hijau, kuning, dan merah yang dibentuk dengan mempertimbangkan hasil analisis, karakteristik fisik dan aktivitas PKL, serta waktu operasional PKL.

1.8.4 Unit Amatan dan Unit Analisis

Batasan dari penelitian ini akan dijelaskan melalui unit amatan dan unit analisis. Batasan penelitian ini diperlukan agar arah dan tujuan penelitian tercapai.

1.8.4.1 Unit Amatan

Unit amatan dalam penelitian ini adalah kawasan pusat perkotaan Bandar Lampung yaitu kawasan disekitar RTH Taman Gajah dan sarana olahraga Lapangan Saburai, koridor Jalan Ahmad Yani – Jalan R. A Kartini dan koridor Jalan Raden Intan. Fokus amatan yaitu terhadap PKL yang berada di kawasan ruang terbuka publik, kawasan pusat perkotaan Bandar Lampung. PKL yang diamati adalah PKL secara umum yang berada di masing-masing segmen lokasi penelitian.

1.8.4.2 Unit Analisis

Unit analisis dari penelitian ini adalah variabel karakteristik fisik dan pengaturan aktivitas PKL yang ada di lokasi penelitian yang merupakan ruang terbuka publik di kawasan pusat perkotaan Kota Bandar Lampung. Dari unit analisis tersebut akan didapatkan data terkait karakteristik fisik serta aktivitas PKL yang ada di lokasi penelitian untuk mengkaji dan menyusun arahan penataan ruang dan pengaturan aktivitas PKL di lokasi penelitian.

1.9 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan penelitian untuk memudahkan penulis, yaitu:

1. Tahapan Pra-Survey.

   Pada tahapan ini terdiri dari persiapan pengumpulan informasi dan data sebelum melakukan survey diantaranya:

   1) Pemilihan topik/ tema penilitian. Pemilihan topik penelitian ini dilakukan dengan mencari topik yang diminati atau isu-isu serta permasalahan yang ada terkait bidang yang diminati. Dari tema tersebut kemudian ditentukan lokasi penelitian yang sesuai dengan tema/ permasalahan yang diangkat.

2) Penentuan rumusan masalah penelitian. Dari tema yang diambil kemudian ditentukan pertanyaan penelitian dan rumusan masalah terkait tema penelitian yang telah ditentukan.
3) Perencanan penelitian. Menentukan metodologi penelitian, sampel, menentukan analisis yang akan dilakukan dan cara pengambilan data baik data primer (contoh: wawancara/observasi) maupun data sekunder.

2. Tahap Pengumpulan Data/ Survey.

Pada tahapan ini berfokus pada pengumpulan data baik data primer maupun sekunder yang telah ditetapkan pada rancangan/ rencana penelitian termasuk kompilasi data dan transformasi data. Untuk pengumpulan data primer dilakukan langsung di lapangan/ lokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi karakteristik fisik dan aktivitas PKL serta wawancara untuk data preferensi PKL di wilayah penelitian. Untuk data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk mendukung analisis data dan data yang didapatkan di lapangan. Data sekunder yang digunakan didapatkan melalui wawancara dengan dinas dan studi literatur.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahapan ini, data yang telah didapatkan dari survey data primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis sesuai dengan jenis data yang didapatkan. Analisis dilakukan kepada sasaran 1, sasaran 2 dan sasaran3 terlebih dahulu kemudian dari hasil analisis ketiga sasaran tersebut akan digunakan sebagai dasar penyusunan arahan penataan ruang dan zonasi aktivitas PKL menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis data akan menghasilkan arahan zonasi penataan ruang serta pengaturan aktivitas PKL di kawasan pusat kota Bandar Lampung.

1.10 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Gambaran Wilayah Studi, Analisis dan Kesimpulan dan Rekomendasi. Masing-masing bab akan disusun berdasarkan sistematika penulisan berikut ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian/masalah, rumusan masalah yang kemudian menjadi pertanyaan penelitian, tujuan studi kemudian sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup baik wilayah, substansi maupun waktu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai *review* teori/konsep yang digunakan dalam penelitian yang terdapat dalam literatur yang berkaitan dengan tema TA. Teori tersebut menjadi dasar pemahaman dalam melakukan penelitian/ yan melatarbelakangi penelitian serta model/teknik analisis yang digunakan dalam metodologi penelitian.

BAB III GAMBARAN WILAYAH STUDI

Pada bab ini dijelaskan tentang deskripsi wilayah atau gambaran umum wilayah penelitian yaitu kawasan pusat perkotaan di Bandar Lampung baik secara makro maupun mikro berdasarkan koridor yang telah ditetapkan. Bab ini terdiri dari peta wilayah penelitian, serta kondisi-kondisi umum wilayah serta tinjauan kebijakan wilayah juga data-data yang berhasil dikumpulkan selama penelitian.

BAB IV ANALISIS

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil/ jenis data apa saja yang didapatkan dari pengumpulan data baik primer maupun sekunder serta cara pengolahan data baik primer maupun sekunder menggunakan tiga jenis analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis spasial. Dalam bab ini juga dijelaskan hasil

dari analisis yang dilakukan terhadap data-data yang didapatkan selama penelitian yang terbagi setiap sasaran untuk menghasilkan jawaban dari tujuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil studi secara keseluruhan, kesimpulan dari penelitian, rekomendasi yang bisa diberiikan serta catatan-catatan keterbatasan dan saran studi lanjutan.